



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PERHUBUNGAN



**RENCANA AKSI
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan perkenanNya, kami telah dapat menyusun Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2023.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja ini secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusunnya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto ini.

Kepala Dinas Perhubungan,

ASPA MUJI S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19810217 199912 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang baik perlu mengadakan perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sesuai batasan waktu yang telah ditentukan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 sebagai komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan pada Visi dan Misi Kabupaten Jeneponto sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO

Berdasarkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan daerah bidang Perhubungan, melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- e. penyelenggaraan administrasi urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

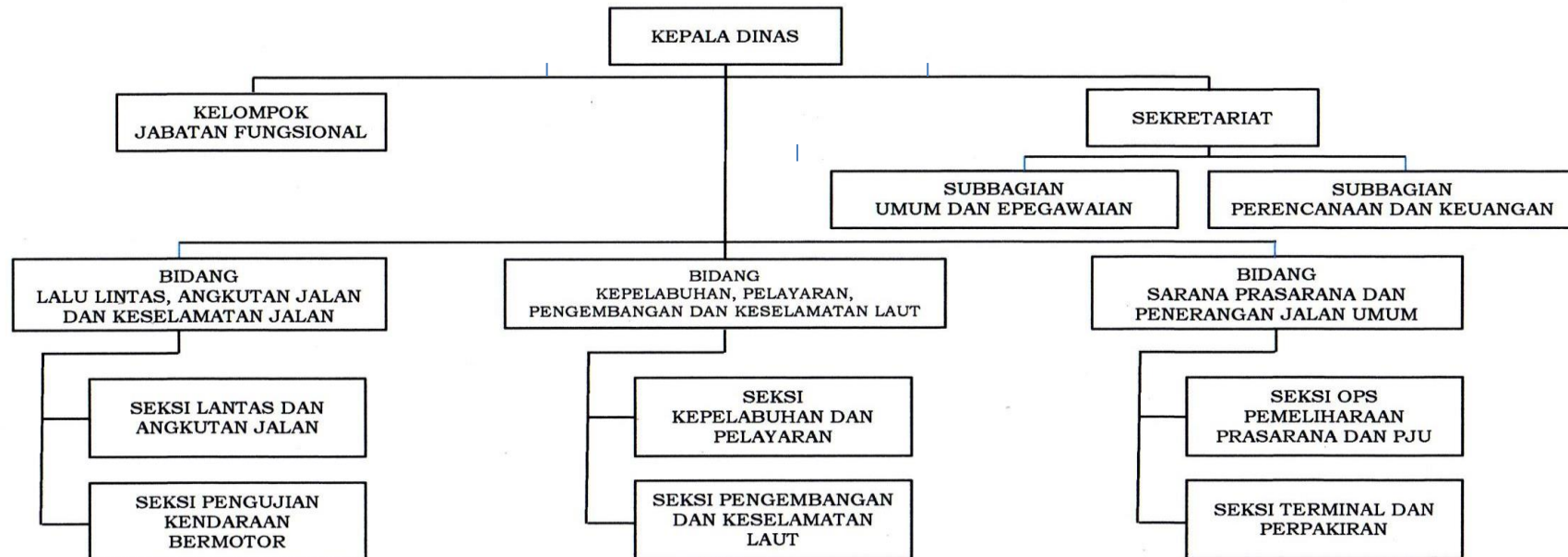
- a. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Bidang Lalulintas, Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 2. Seksi Pengujian Kendaraan bermotor
- c. Bidang Kepelabuhan, Pelayaran, Pengembangan dan Keselamatan Laut, membawahi:
 1. Seksi Kepelabuhan dan Pelayaran
 2. Seksi Pengembangan dan Keselamatan Laut

- d. Bidang Tehnis Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum, membawahi:
1. Seksi Pembinaan Operasional, peralatan dan pemeliharaan
 2. Seksi Terminal dan perparkiran.

Gambar Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



1.3 TUJUAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (Outcome). Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Perjanjian Kinerja adalah :

- 1.3.1 Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi
- 1.3.2 Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- 1.3.3 Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja aparatur pemerintahan
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana aksi atas perjanjian kinerja) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai.

Indikator Kinerja dalam dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jeneponto menggunakan indikator kinerja tingkat hasil (Outcome) dan menggambarkan ukuran keberhasilan secara keseluruhan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja Tahun 2021 sebagai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Dapat Dilihat Pada Lampiran Rencana Aksi).

BAB III PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jenepono Tahun 2023 ini merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di Dinas Perhubungan Kabupaten Jenepono. Dengan demikian rencana aksi atas perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dokumen Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jenepono diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja, dengan memacu bawahan untuk lebih meningkatkan kinerjanya kepada atasan dan kepada masyarakat.

Demikian kami sampaikan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jenepono Tahun 2023, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.



Kepala Dinas Perhubungan,

ASPA MUJI S. STP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19810217 199912 1 001

LAMPIRAN

**RENCANA AKSI (RA)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran		Anggaran (Rp)	Target			Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	100	%	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,176,430,422	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,426,450	Tersedianya 12 Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan Renja Yang Disusun	1 Dok	12,060,000	TW 1 :	8,150,000	68%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	1 Dok	TW 2 :								-		-			
				Jumlah Dokumen Renja Yang Disusun	1 Dok								TW 3 :		3,910,000	32%		
													TW 4 :		-	-		
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,700,000							TW 1 :	-	-	Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
												TW 2 :	-	-				
												TW 3 :	-	-				
												TW 4 :	4,700,000	100%				
			Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4,698,450							TW 1 :	-	-	Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
												TW 2 :	-	-				
												TW 3 :	-	-				
												TW 4 :	4,698,450	100%				
			Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,146,000							TW 1 :	-	-	Kasubag Perencanaan dan Keuangan			
												TW 2 :	-	-				
												TW 3 :	-	-				
												TW 4 :	5,146,000	100%				

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran (Rp)	Target	Penanggung Jawab		
											Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Yang Disusun	1 Dokumen	4,887,000	TW 1 : - - TW 2 : - - TW 3 : - - TW 4 : 4,887,000 100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen IKU, Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja Yang Disusun	3 Dokumen	4,535,000	TW 1 : 4,535,000 100%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
											Jumlah Dokumen LKjIP Yang Disusun	1 Dokumen		TW 2 : - - TW 3 : - - TW 4 : - -			
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,400,000	TW 1 : - - TW 2 : 1,350,000 25.00% TW 3 : 1,350,000 25.00% TW 4 : 2,700,000 50.00%		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,467,265,422	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2,452,770,422	TW 1 : 842,689,468 34.36% TW 2 : 687,433,662 28.03% TW 3 : 538,951,554 21.97% TW 4 : 383,695,738 15.64%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Buku Kas Umum BKU, SPJ Fungsional dan Laporan	36 Laporan	6,147,000	TW 1 : 1,705,800 27.75% TW 2 : 1,451,800 23.62% TW 3 : 1,620,700 26.37% TW 4 : 1,368,700 22.27%	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	1 Dokumen	4,218,000	TW 1 : 4,218,000 100% TW 2 : - - TW 3 : - - TW 4 : - -	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran (Rp)	Target	Penanggung Jawab	
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun 1 Dokumen	4,130,000	TW 1 : - - TW 2 : - - TW 3 : 4,130,000 100% TW 4 : - -	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,662,499	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kantor	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik Yang Diadakan 4 Jenis	5,004,000	TW 1 : 5,004,000 100% TW 2 : - - TW 3 : - - TW 4 : - -	Kasubag Umum dan Kepegawaian
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Diadakan 1 Jenis	2,000,000	TW 1 : 2,000,000 100% TW 2 : - - TW 3 : - - TW 4 : - -	Kasubag Umum dan Kepegawaian
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor Yang Diadakan 8 Jenis Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Diadakan 19 Jenis Jumlah Jenis Bahan Natura Yang Diadakan 5 Jenis	25,106,400	TW 1 : 7,442,300 30% TW 2 : 6,076,900 24% TW 3 : 5,848,600 23% TW 4 : 5,738,600 23%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
												Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak Yang Diadakan 2 Jenis Jumlah Penggandaan 100000 Lembar	6,000,000	TW 1 : 875,000 14.58% TW 2 : 1,775,000 29.58% TW 3 : 2,475,000 41% TW 4 : 875,000 15%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Iklan 2 Kali Jumlah Koran Harian Yang Disediakan 1080 Eksemplar	3,600,000	TW 1 : 900,000 25% TW 2 : 900,000 25% TW 3 : 900,000 25% TW 4 : 900,000 25%	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran (Rp)	Target	Penanggung Jawab	
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rata-rata Pelaksanaan Rapat Internal Jumlah Rata-rata Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Rata-rata Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Kali 30 Kali 40 Kali	53,952,099	TW 1 : 20,515,000 38% TW 2 : 17,010,000 32% TW 3 : 13,412,099 25% TW 4 : 3,015,000 6%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
							495,566,051	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Kantor	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Rekening Air Yang Terbayarkan Jumlah Bulan Rekening Listrik Yang Terbayarkan Jumlah Bulan Rekening Telepon dan Wifi Yang Terbayarkan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	54,969,251	TW 1 : 13,742,312 25% TW 2 : 13,742,313 25% TW 3 : 13,742,313 25% TW 4 : 13,742,313 25%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Petugas Perhubungan	12 Bulan 86 Orang	440,596,800	TW 1 : 110,149,200 25.00% TW 2 : 110,149,200 25.00% TW 3 : 110,149,200 25.00% TW 4 : 110,149,200 25.00%	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran (Rp)	Target	Penanggung Jawab	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,510,000	Bertambahnya Masa Usia Pakai Asset Kantor	100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Yang Dipelihara dan Diurus Izinnya 3 Unit Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Yang Dipelihara dan Diurus Izinnya 2 Unit	76,510,000	TW 1 : 46,160,000 60.33% TW 2 : 12,950,000 16.93% TW 3 : 8,700,000 11.37% TW 4 : 8,700,000 11.37%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Meningkatkan Kinerja Sektor Perhubungan	Meningkatnya Layanan Transportasi	Persentase Fasilitas LLAJ Yang Berfungsi Baik Persentase Layanan Angkutan Umum Persentase Uji KIR Angkutan Umum Rasio Izin Trayek	80 85 80 0.0016	% % % 	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	91,655,000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	54,500,000	Terpenuhinya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kartu Smart Card (BLU-E) Yang diadakan 1200 Buah Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor Yang Terpelihara 8 Jenis	36,500,000 18,000,000	TW 1 : - - TW 2 : 36,500,000 100% TW 3 : - - TW 4 : - - TW 1 : - - TW 2 : - - TW 3 : 18,000,000 100% TW 4 : - -	Kasi. Pengujian Kendaraan Bermotor Kasi. Pengujian Kendaraan Bermotor

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran (Rp)	Target	Penanggung Jawab	
								Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	5,000,000	Terpenuhinya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas	100%	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas untuk Jaringan Jalan di Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Pemenuhan Operasional 12 Bulan Jumlah Personil LLAJ 3 Orang Jumlah Personil Pendamping POLRI 3 Orang	5,000,000	TW 1 : 5,000,000 100% TW 2 : - - TW 3 : - - TW 4 : - -	Kasi. Lalulintas dan Angkutan Jalan
								Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	32,155,000	Terpenuhinya Pemantauan KIR	100%	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Uji Kendaraan 1 Laporan Jumlah Personil Pendamping POLRI 3 Orang Jumlah Personil Pendamping Kejaksanaan 3 Orang	32,155,000	TW 1 : - - TW 2 : - - TW 3 : 32,155,000 100% TW 4 : - -	Kasi. Lalulintas dan Angkutan Jalan
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Memadai dan Berfungsi Baik	80	%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	110,200,000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	10,200,000	Terpenuhinya Pemantauan Pos Retribusi	100%	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Pemantauan Pos Retribusi 1 Laporan	10,200,000	TW 1 : - - TW 2 : - - TW 3 : 10,200,000 100% TW 4 : - -	Kasi. Terminal dan Perparkiran
								Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	100,000,000	Terpenuhinya Pengadaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara 1 Paket	100,000,000	TW 1 : - - TW 2 : 100,000,000 100% TW 3 : - - TW 4 : - -	Kasi. Operasional Pemeliharaan Prasarana dan Penerangan Jalan Umum

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program	Anggaran (Rp)	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Indikator Hasil Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Anggaran (Rp)	Target	Penanggung Jawab				
3	Meningkatkan Kinerja Sektor Perhubungan	Meningkatnya Layanan Transportasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Angkutan Laut	100	%	Program Penyelenggaraan Pelayaran	12,925,000	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	6,850,000	Tersedianya Laporan Data dan Informasi Angkutan Laut	100%	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data dan Informasi Angkutan Laut Yang Disusun	1 Laporan	6,850,000	TW 1 :	-	-	Kasi. Kepelabuhan dan Pelayaran
			TW 2 :	-	-														
			TW 3 :	6,850,000	100%														
			TW 4 :	-	-														
			Persentase Sarana dan Prasarana Angkutan Laut	100	%				6,075,000	Terpenuhinya Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Laut Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Wilayah Laut	1 Laporan	6,075,000	TW 1 :	-	-	Kasi. Pengembangan dan Keselamatan Laut
			TW 2 :	-	-														
			TW 3 :	6,075,000	100%														
			TW 4 :	-	-														

JENEPONTO, 17 JANUARI 2023
 DIREKTORASIS PERHUBUNGAN



M. Si
 Kepala, Pemuda Utama Muda
 Np. 198102/19912 1 001